

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang dapat mengancam bangsa Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang atau 11,47 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar 0,27 juta orang atau 0,22 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 yakni sebesar 28,28 juta orang atau 11,25 persen (Badan Pusat Statistik, 2014). Angka kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia masih banyak bahkan menjadi salah satu masalah sosial yang amat serius. Kemiskinan sering dihubungkan dengan keterbelakangan serta ketertinggalan.

Menuntaskan kemiskinan masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah, terutama bagi masyarakat pedesaan. Kemiskinan kini menjadi suatu identitas yang melekat dengan pedesaan, bahkan seperti warisan yang diterima turun-menurun. Masyarakat yang tinggal di pedesaan sebagian besar masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Hal tersebut tidak akan berubah secara signifikan jika pemerintah tidak melakukan hal yang mendasar. Sahdan (2005) menyatakan bahwa kemiskinan di pedesaan sampai saat ini tetap menjadi kantong utama kemiskinan dimana 60% penduduk miskin di Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang disebabkan oleh keisolasian wilayah, kekurangan sumber daya alam dan rusaknya lingkungan sekitar. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks ini membutuhkan intervensi dari semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Pemerintah berupaya mengatasi hal ini salah satunya dengan meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang biasa disebut PNPM Mandiri Pedesaan yang diharapkan mampu untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan dalam pembangunan.

Pada 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PNPM Mandiri Pedesaan salah satunya yaitu di Provinsi Jawa Timur. Adapun daftar lokasi dan alokasi tahun 2014 terdiri dari 38 Kabupaten dan 663 Kecamatan dengan total

anggaran dana sebesar Rp.1.063.950,00 juta. Rinciannya yaitu total APBN sebesar Rp. 1.000.298,75 juta dan total APBD sebesar Rp. 63.651,25. Salah satu Kecamatan di Jawa Timur yang sudah menjalankan dan menerima program ini adalah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Total bantuan tahun 2013 sebesar Rp 800 juta dengan total APBN Rp. 760 juta dan total APBD 40 juta sedangkan pada tahun 2014 total bantuan sebesar Rp. 700 juta dengan total APBN Rp. 665 juta dan total APBD Rp. 35 juta dimana hal ini terjadi penurunan anggaran dana dari tahun sebelumnya.

Desa Panaguan merupakan salah satu desa di Kecamatan Larangan dengan jumlah penduduk 2.652 jiwa dan termasuk salah satu desa sebagai predikat baik dalam pengelolaan PNPM Mandiri Pedesaan yang dilanjutkan ke Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Generasi Sehat dan Cerdas atau yang biasa dikenal dengan PNPM GSC se Kabupaten Pamekasan. Menurut Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dana sharing APBN dan APBD selalu disediakan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 alokasi dana sebesar Rp. 81.127.200, tahun 2012 sebesar Rp.79.994.600 sedangkan untuk tahun 2013 untuk PNPM-MP sebesar Rp. 57.770.500 sedangkan untuk dana PNPM-GSC sebesar Rp. 39.087.000.

PNPM Mandiri Pedesaan lebih menekankan pada pemberdayaan mental dan moral meskipun kegiatan-kegiatan yang difasilitasi untuk dilaksanakan lebih pada pembangunan prasarana dasar lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Program ini sangat diharapkan adanya keswadayaan masyarakat dan keterlibatan aktifnya dalam setiap tahapan kegiatan seperti proses identifikasi masalah dan penyebabnya, penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan hingga pada tahapan evaluasi dan pemeliharaan. Proses program pemberdayaan secara umum sering ditemui hambatan-hambatan dan kegagalan-kegagalan dalam hal implementasi. Menurut Maulana (2009) hambatan yang sering terjadi yaitu mudurnya partisipasi masyarakat dalam program dan tidak adanya pemanfaatan modal sosial dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan.

Menurut Fukuyama (1995) modal sosial dapat dikatakan sebagai sumber daya sosial yang dimiliki oleh masyarakat dan sebagai sumber daya tentunya modal sosial ini memberikan peranan sebagai kekuatan dalam beberapa kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat dimana semakin bertambah kegunaannya

apabila semakin intensif di dayakan modal sosial itu. Badaruddin (2003) menyebutkan bahwa modal sosial dibangun dari 3 dimensi yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*networks*), dan pranata sosial (*social institution*) yang mana diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas bagi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Modal sosial merupakan faktor produktif yang memberikan manfaat bagi setiap individu yang mampu membangun hubungan dengan individu atau kelompok lain sehingga nantinya bermanfaat bagi pembangunan agar tidak menjadi satu mata rantai yang hilang (*the missing link*) khususnya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Grootaert, 1997).

Melihat hakikat dan pengertian dari modal sosial di atas maka dapat dicermati dan dipahami bahwa nantinya akan memberi peluang yang cukup baik dalam *optimalisasi* program pemberdayaan yang dilakukan sehingga dengan adanya upaya mensinergikan suatu program dengan modal sosial pada masyarakat penerima program maka hal tersebut akan memberi pencapaian yang maksimal, sehingga PNPM Mandiri Pedesaan berjalan dengan baik dan mampu mengatasi kemiskinan yang ada di pedesaan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan ulasan di atas dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemanfaatan modal sosial dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis manfaat dari modal sosial dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

2. Mengetahui dan menjelaskan tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian di atas adalah :

1. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk menentukan pengalokasian modal sosial dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Bagi masyarakat di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, untuk mengetahui dan menambah informasi tentang PNPM Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Panaguan yang dirasakan masyarakatnya.
3. Bagi program studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa yang dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari satu karya ilmiah.
4. Bagi ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi penelitian lain yang lebih lanjut, terutama yang menyangkut modal sosial dan PNPM Mandiri Pedesaan, maupun program lainnya.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya bersifat kualitatif, yaitu untuk mengetahui manfaat dari modal sosial yang dialokasikan dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Hasil penelitian diperoleh melalui alat analisis *Social Capital Assessment Tool* (SOCAT), yaitu mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.